



Melayu Islam dan Batak Kristen: Labelisasi Keagamaan Terhadap Identitas Kesukuan di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20

Syaiful Anwar*

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the religious labelling of ethnicity on Malay and Batak identities in East Sumatra in the early 20th century. The labelling refers to the mention of Malay as Islam and Batak as Christian. The labelling of religious identity strengthened along with the start of Dutch East Indies colonization of East Sumatra. The colonization of the Dutch East Indies changed various religious social lives between the inland people who were often called the Bataks with the coastal people called the Malays. Significant changes to the labelling have occurred since the arrival of European zending to the North Tapanuli region and influenced the social life of the Batak people in the inland at the end of the 19th century. Meanwhile, the Malay identity as Islam has become an inseparable unit, even before the colonization of East Sumatra. This article uses the historical method. Heuristics or collection of sources for this article are primary and secondary sources that discuss social situations in the contemporaries. Furthermore, source criticism and interpretation of historical facts will be carried out using theories or concept from the social sciences. the results of the study show that the religious labelling of Malay and Batak identities has two different poles. Malay as an Islamic identity that occurs because of labelling carried out internally. The Malay community identifies itself as Islam which means that Malay is the same as Islam. Meanwhile, Batak identity as a Christian is more likely to emerge due to external consequences. The attitude of the Dutch East Indies colonial politics that wanted to orbit Batak culture has formed various institutions that are mostly filled by zending parties. Therefore, the Batak identity as a Christian is more likely to be carried out by people outside the Christian religion, even though the person who does it is a Batak ethnic but having Islam as his/her religion.

ARTICLE HISTORY

Submitted 11 November 2022
Revised 29 November 2022
Accepted 10 December 2022

KEYWORDS

Labelling; identity; religion; ethnicity; East Sumatra.

CITATION (APA 6th Edition)

Anwar, S. (2022). Melayu Islam dan Batak Kristen: Labelisasi Keagamaan Terhadap Identitas Kesukuan di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 3(3), 82-92.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

syaifulanwar@iainbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v3i3.1630>

PENDAHULUAN

Suku Melayu dan Batak adalah suku-suku asli yang terdapat di Sumatera Utara. Selain itu terdapat suku-suku lain maupun bangsa yang dianggap sebagai pendatang, yang secara kultural dianggap juga sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Utara. Secara kuantitas, suku Batak adalah yang terbesar (44,75 %) (Utara, 2019). Suku Batak menempati posisi dominan dalam labelisasi kekhasan etnik untuk wilayah Sumatera Utara, terutama jika merujuk para perantau yang berasal dari tempat itu. Meskipun begitu, suku Melayu tidak bisa diabaikan sebagai etnik yang punya pengalaman sejarah yang panjang dalam mendiami pesisir timur Sumatera dan membentuk kawasan yang dikenal sebagai Sumatera Utara sekarang ini.

Suku Melayu dan Batak di Sumatera Utara telah berkembang lebih dari sekadar etnisitas. Keduanya telah merujuk pada pelabelan agama antara orang Melayu dan orang Batak. Melayu kerap menjadi bagian dari agama Islam, sementara Batak selalu punya keterkaitan dengan agama Kristen. Realitas kekinian masih memperlihatkan bahwa penyebutan Batak untuk merujuk agama Kristen dapat ditemui di kampung-kampung pedalaman yang masih menjadi bagian kawasan Sumatera Timur (penyebutan untuk wilayah pesisir Sumatera Utara). Sementara itu dalam penyebutan Melayu untuk merujuk seseorang yang beragama Islam hampir tidak ditemukan dalam relasi sosial Sumatera Utara. Seseorang yang bersuku Melayu sudah dianggap sebagai Islam tanpa harus menyebutkannya sebagai orang Melayu untuk menunjukkan keislaman mereka.

Realitas Batak dalam menyebut kekristenan seseorang tidak terlepas dari persoalan etnisitas itu sendiri. Dalam etimologi dan terminologi Batak terdapat persoalan historis yang mendasarinya. Sebelum agama Kristen berkembang di tanah Batak pada abad ke-19, penyebutan “Batak” sendiri dianggap bukan mewakili masyarakat etnik di pedalaman Sumatera Utara. Penyebutan “Batak” lebih luas dari sekadar sebuah etnisitas, apalagi dalam melabelkan ke suatu masyarakat. Menurut Ichwan Azhari, asal-usul “Batak” berasal dari penyebutan bangsa Barat terhadap orang-orang pedalaman di Asia Tenggara (Simarmata, [2016](#)). Artinya, penyebutan tersebut tidak hanya berada di pedalaman Sumatera Utara, melainkan juga ada di Filipina dan Malaysia. Penyebutan “Batak” diartikan sebagai udik dan kasar, serta dianggap kurang berbudaya, tentunya dengan ukuran Barat. Dalam kasus tersebut, Azhari menyebut bahwa Batak sejak lama ditinggalkan atau dihilangkan sebagai penyebutan orang pedalaman di Filipina maupun Malaysia karena terkesan untuk merendahkan. Sementara penyebutan tersebut berlanjut sebagai golongan suku yang ada di pedalaman Sumatera Utara, khususnya di sekitar Danau Toba dan wilayah Silindung yang disebut sebagai Tapanuli Utara.

Penyematan “Batak” sebagai etnik mendapat pertentangan justru di antara suku-suku bermarga lain di wilayah Tapanuli, yakni antara orang Mandailing dengan Batak Toba. Dalam beberapa studi disebutkan bagaimana hal ini menjadi polemik dalam paradigma sosio-historis dalam konstruksi identitas Batak pada etnik Mandailing dan Angkola (Hidayat & Damanik, [2018](#)). Belum bisa dipastikan apakah polemik tersebut terkait dengan persoalan agama, di mana suku Mandailing mayoritas Islam dengan orang Batak Toba yang mayoritas Kristen. Namun, secara historis pernah ada peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Sei Mati di Kota Medan pada 1922-1925, antara orang Mandailing dan Sipirok yang sama-sama Islam terpecah karena orang Sipirok menyematkan dirinya sebagai Batak. Peristiwa ini ditandai dengan penolakan jenazah orang Sipirok yang ingin dikuburkan di pekuburan Sei Mati (Pelly, [1994](#)).

Tidak bisa dipungkiri bahwa kedatangan agama Islam dan Kristen di wilayah Tapanuli memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Agama Islam menyebar di Tapanuli Selatan pada paruh pertama abad ke-19 melalui Paderi (Amliansyah, [2021](#)). Sementara Kristen berkembang sejak paruh terakhir abad ke-19 melalui misi *zending* yang dipimpin oleh L. I. Nommensen. Penyebaran dan perkembangan dua agama tersebut memiliki dinamikanya masing-masing. Ketika suku dari kedua wilayah Tapanuli bertemu di Sumatera Timur yang pada waktu itu menjadi kawasan paling berkembang secara ekonomi, maka keterpisahan semakin kuat. Hal ini disebabkan kawasan Sumatera Timur, meskipun dikuasai pihak kolonial, Islam telah menjadi bagian masyarakat Melayu yang telah lama mendiami kawasan tersebut.

Agama menjadi persyaratan utama oleh penguasa lokal Sumatera Timur untuk izin bermukim. Mereka yang bukan beragama Islam pada umumnya menempati kantong-kantong perkebunan yang diusahakan oleh pihak kolonial atau tempat-tempat yang jauh dari pemukiman Melayu. Dalam situasi ini, seorang bermarga sering dianggap bukan bagian dari Islam sehingga bagi orang-orang “Batak” yang beragama Islam kerap menanggalkan marganya agar bisa menjadi bagian sosial masyarakat Melayu. Kadang-kadang meskipun seorang Batak kurang jelas agamanya, ia tetap menanggalkan marganya agar bisa diterima masyarakat Sumatera Timur. Nantinya, setelah kemerdekaan Indonesia, orang-orang ini banyak yang kembali menggunakan marganya untuk menunjukkan identitas kesukuannya.

Tentunya menjadi pertanyaan, apakah tindakan penguasa lokal tersebut disebabkan persoalan agama yang menganggap Batak bagian dari agama Kristen atau karena persoalan etnisitas secara etimologi dan terminologi yang telah disebutkan sebelumnya? Berbagai kajian yang mengkaji etnisitas di Sumatera Utara masih terbatas pada kategorisasi kelompok etnik atau hanya menyentuh persoalan etnik secara historis (Hidayat & Damanik, [2018](#); Tanjung, Purwanto, & Setyawati, [2016](#)). Termasuk pada kajian masuknya agama ke Tapanuli Selatan dan masuknya agama Kristen ke Tapanuli Utara belum menyentuh hubungan etno-historis antara agama dengan etnisitas yang mengarah pada labelisasi. Padahal labelisasi keagamaan tersebut masih bisa dilihat pada realitas kekinian (Amliansyah & Fatimah, [2021](#); Aritonang, [2014](#)).

METODE

Kajian ini adalah kajian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Oleh sebab itu metode yang dilakukan adalah metode sejarah yang memiliki poin penting dalam telaah sumber (Kuntowijoyo, [2021](#)). Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber sezaman kolonial seperti *Oostkust van Sumatra-Instituut*, *Mededeeling* No. 12, Surat Kabar *Bintang Batak* tahun 1938, Surat Kabar *Immanuel* edisi 17 Agustus 1919 dan *Mededeelingen D.A.C.*, No. 48, 1938. Selain itu *statblaad* dan *Verslag betreffende de Gemeente Medan* dari tahun 1919 sampai 1938 sebagai terbitan resmi pemerintah menjadi sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan juga diverifikasi untuk melihat kebenarannya dan kesesuaian atas penelitian ini. Termasuk membandingkan dengan kajian sebelumnya yang berkaitan dengan budaya, sosial dan politik yang membahas realitas historis sezaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Melayu sebagai Islam

Konstruksi agama di dalam etnisitas terhadap Melayu menjadi Islam tidak hadir begitu saja. Jika merunut atas perkembangan secara etimologi dan terminologi, Melayu memiliki padanan makna yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki banyak arti (sungai, gunung, dsb). Sementara mengkaitkan Melayu sebagai identitas keislaman memiliki suatu proses tersendiri pula.

Pemahaman Melayu tidak sekadar sebagai konstruksi budaya, melainkan juga sebagai identitas keagamaan setidaknya muncul sejak abad-13. Hal ini ditandai dari berbagai hubungan yang terjadi dalam sistem penyebaran agama Islam hingga ke Nusantara. Melayu bahkan tidak sekadar sebagai komunitas etnik, melainkan telah menjadi kumpulan etnik yang terlindungi oleh agama yang sama, yakni Islam (Huda, [2016](#)). Alasannya, pola penyebaran agama Islam memiliki keunikan sendiri dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dan dakwah berikut dengan ajaran-ajaran fiqih di dalamnya. Misalnya terlihat pada *Kasidah Burdah*, *Syaraful Anam*, *Syair Rampai Maulid*, dan sebagainya yang tidak terlepas dalam penggunaan bahasa Melayu. Dalam pemakaian *arab gundul* juga ditemui bagaimana bahasa menjadi konstruksi identitas keagamaan Islam sebagai bagian dari Melayu, di mana bahasa yang terbaca tetap dikenal sebagai bahasa Melayu, namun dalam penulisannya menggunakan sebagai bahasa Arab. Pada argumen terakhir bisa saja itu disebut konstruksi budaya atau akulturasi budaya. Akan tetapi usaha untuk memberikan identitas Melayu sebagai Islam telah muncul dalam bentuk kebahasaan. Pada abad ke-16 kita bisa menemukan syair-syair tasawuf Hamzah Fansuri yang menyerap sekitar 2000 kata Arab ke dalam bahasa Melayu (Hadi, [2000](#)).

Bagi pemerintah Malaysia sendiri menganggap bahwa apa yang disebut Melayu juga berarti Islam. Malaysia menganggap bahwa pada dasarnya Melayu adalah konstruksi sosiologis yang memiliki indikator seperti: individu yang melaksanakan ada istiadat Melayu, berbahasa Melayu dan memeluk Islam (Huda, [2016](#)). Tanpa ketiga indikator tersebut maka tidak bisa disebut sebagai Melayu. Meskipun seseorang tersebut memiliki adat istiadat Melayu dan berbahasa Melayu, jika tidak memeluk Islam tidak bisa disebut sebagai Melayu. Sementara dalam pemahaman Melayu sebagai kumpulan etnik, maka seseorang yang memiliki ketiga indikator disebut sebagai Melayu, meskipun tidak memiliki kaitan genealogis (Huda, [2016](#)). Oleh sebab itu terdapat pemahaman yang sebenarnya memiliki kerancuan, apakah Melayu adalah suatu etnik secara budaya atautkah etnik dalam pemahaman suku bangsa.

Kondisi sosial yang terjadi di Sumatera Timur memiliki kesamaan atas definisi Melayu dalam pemahaman Malaysia. Memang secara genealogis, sosial, sejarah, dan geografis terdapat kesamaan antara orang Melayu di Malaysia dengan Melayu di Sumatera Timur. Orang Melayu di Sumatera Timur merupakan keturunan dari campuran antara orang Melayu yang telah menetap di Sumatera Timur dengan orang Melayu yang datang dari Johor, Riau, Aceh, Minangkabau, dan sebagainya yang berbahasa Melayu dan yang terpenting adalah beragama Islam (Husny, [1978](#)). Oleh sebab itu, penyebutan Melayu sebagai Islam tidak memiliki perbedaan pada Melayu di luar Sumatera Timur. Dengan kata lain, penyebutan Melayu sebagai Islam juga tidak bisa menjadi milik orang Melayu di Sumatera Timur saja, melainkan juga Melayu yang ada di luar Sumatera Timur.

Islam masuk ke Sumatera sekitar awal abad ke-14 di Pasai. Hal ini dibuktikan oleh keberadaan suatu makam yang berasal dari awal abad ke-14 bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Mansyur Abu Ja'far al Abbasi al-Muntasir yang berasal dari Gujarat dalam penyiaran agama Islam di Pasai (Winstedt, [1940](#)). Namun, bukti terbaru menunjukkan fakta lain, sebab Islam justru bermula dari Barus. Penemuan tugu yang menjadi titik nol penyiaran agama Islam di Barus bahkan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2017 (Kurniawan, [2018](#)). Akan tetapi fokus utamanya adalah bahwa Islam sendiri telah dimulai sejak abad ke-14 di wilayah yang memiliki keterkaitan pada pesisir timur Sumatera yang berisi orang-orang Melayu.

Menurut Mailin penyebaran agama Islam di Sumatera Timur bermula dari Kesultanan Asahan ketika Sultan Iskandar Muda sebagai Raja Aceh melakukan perjalanan ke Malaka pada 1612 (Mailin, [2016](#)). Sejak perjalanan itu penguasa Asahan memeluk agama Islam pada 1620, yakni Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. Setelah itu agama Islam menyebar untuk seluruh pantai timur Sumatera yang berisi orang-orang Melayu. Penguasa Deli, Serdang, Batubara, hingga Kota Pinang menjadi Islam pada masa-masa setelahnya hingga kolonial datang dan pergi. Islam tetap menjadi ciri khas agama oleh orang-orang Melayu di Sumatera Timur. Hingga abad ke-19 tidak ada catatan yang menjelaskan meluasnya perkembangan Islam di Sumatera Timur. Namun, tradisi lisan serta situasi sosial sudah cukup memberikan kenyataan bahwa Islam tidak hanya telah berkembang, melainkan menjadi sendi utama dalam kehidupan orang-orang Melayu di Sumatera Timur.

Sekitar 1875 barulah mulai ada catatan tentang perkembangan Islam ini, khususnya terdapat catatan yang menyebut Syekh Abdul Wahab sebagai ulama terkenal yang mengembangkan tarekat dengan ribuan murid di Sumatera Timur. Wilayah-wilayah yang bisa dilacak mendapatkan pengaruhnya adalah Kualuh, Panai, Bila, Kota Pinang, Langkat, Batang Serangan, yang terbentang sepanjang pantai timur Sumatera. Setelah itu pada awal abad ke-20 muncul Ulung Basir yang nantinya akan membawa tarekat Naqsybandiyah di wilayah Deli, Sumatera Timur. Termasuk Syekh Hasan Ma'sum yang juga ulama terkenal dalam pendidikan Islam dan penyebaran Islam untuk Sumatera Timur. Kekuatan Islam sebagai agama dan sebagai representasi Melayu di Sumatera Timur memang tidak diragukan lagi. Meskipun unsur Melayu tersebut secara etimologi maupun terminologi berasal dari Sansekerta yang mengarah pada pemahaman Hindu, namun sekarang hal tersebut sekarang telah kabur dan barangkali tidak dapat ditemukan unsur Hindunya.

Secara sederhananya, Melayu dianggap dan dipercaya pasti Islam dengan indikator pokok yang telah disebutkan; berbahasa Melayu, melakukan kegiatan budaya Melayu, dan beragama Islam. Tanpa ketiga itu maka Melayu tidak bisa disandang oleh seseorang. Sebaliknya, apapun itu bentuk genealogisnya, jika memakai ketiga indikator tersebut, maka seseorang disebut Melayu. Oleh sebab itu persyaratan terakhir yang harus beragama Islam telah menunjukkan bahwa Melayu dipastikan sebagai Islam. Namun, setelah melihat uraian tersebut, Melayu tidak bisa juga disebut suatu etnik berdasarkan genealogis, melainkan bentuk konstruksi sosiologis yang memiliki kesempatan terbuka bagi suku bangsa manapun untuk menjadi Melayu atau tidak.

Konstruksi Batak sebagai Kristen

Berbeda dengan konstruksi Melayu sebagai Islam; Batak menjadi Kristen tidak memiliki akar historis yang panjang. Akan tetapi sangat mempengaruhi perkembangan historis untuk Sumatera Utara. Khususnya dalam mengenai sejarah sosial dan budayanya. Pada 1291, Marco Polo mencatat kehidupan di kawasan Sumatera Utara tersebut memiliki populasi yang memiliki perbedaan cara hidup; di pesisir yang menganut Islam dan di pedalaman pegunungan yang disebut menganut paganisme, biadab, dan kanibal (Perret, [2010](#)). Bagi para penjelajah sesudahnya yang berkesempatan datang dan melihat orang-orang pedalaman tersebut seperti Nicolo de' Conti menyebut "*Batech*". Barangkali ia adalah orang pertama yang memberikan penyebutan atas suku tersebut. Lalu Tome Pires menyebutnya "*seorang Bata*" dalam *Suma Oriental* pada awal abad ke-16 (Cortesao, [2015](#)). Lalu Mandes Finto, seorang Eropa yang menyelidiki orang-orang di pedalaman Sumatera Utara mencatat "*raja orang Bata*" yang masih menganut Pagan (Perret, [2010](#)). Pada 1563, Joao de Barros menggunakan nama "*Batas*" sebagai salah satu suku yang dikenal gemar berperang dan memiliki kecenderungan kanibal untuk menunjuk orang-orang yang berada di pedalaman (Perret, [2010](#)).

Barangkali penyebutan *Batech*, *Bata*, *Batta*, atau *Batas* untuk merujuk pada etnik Batak bukan sekadar penyebutan untuk orang-orang berpaganisme atau yang gemar berperang dan kanibal pula, melainkan dari kebiasaan mereka yang punya mobilitas tinggi sehingga harus menunggang kuda. Memang orang tersebut adalah orang pagan, akan tetapi makna Batak sendiri bukan berarti melihat sisi sifat yang nampak biadab sebab makna Batak sendiri tidak ada merujuk kebiadaban dalam arti bahasa apapun. Makna yang hadir dalam bentuk 'kebiadaban' tersebut muncul dari konstruksi para penyebutnya. Sama dengan penyebutan 'Melayu' dapat dimaknai dengan kemalasan, meskipun artinya berbeda, tetapi karena makna dikonstruksi oleh situasi dan kondisi sosial yang ada maka maksudnya menjadi negatif. Di satu sisi boleh saja orang tidak setuju dengan penyebutan Batak, tapi di sisi lain ada orang-orang yang memiliki usaha untuk mengembalikan makna tersebut ke dalam aslinya sehingga mengikis makna yang telah dikonstruksi dalam pendapat umum.

Hubungan Batak pada orang-orang pesisir yang bersuku Melayu juga telah terjalin sejak begitu lama. Baik sebelum atau sesudah Islam datang dan menjadi kepercayaan tunggal oleh masyarakat pesisir. Batak tetap menjalin hubungan dalam bentuk ekonomi, sosial, dan sebagainya yang memang terkadang menimbulkan gejolak, tetapi tidak menghentikan hubungan tersebut. Kadang-kadang orang-orang pegunungan yang disebut sebagai Batak menjadi kawula orang-orang pesisir. Orang-orang Batak yang menginginkan pindah ke wilayah pesisir yang dikuasai orang Melayu selalu diterima jika menerima syarat: berbahasa Melayu, mengikuti adat Melayu dan beragama Islam (Mailin, [2017](#)). Di wilayah Asahan banyak yang akhirnya beralih menjadi orang Melayu dan menanggalkan marga di belakang nama mereka, bahkan hingga masa-masa terakhir kolonial.

Situasi hubungan itu mulai berbeda ketika masuknya *zending* ke tanah Batak. Hubungan Melayu dan Batak tidak lagi hubungan pesisir dan pedalaman atau antar etnik, melainkan hubungan tarik-menarik kepentingan antara Islam dan Kristen yang turut terbawa sejak konflik dalam Perang Salib di Asia Barat. Perkembangan agama Kristen di tanah Batak dimulai pada 1820 ketika Raffles berkuasa di daerah Bengkulu. Pada saat itu terdapat 3 misionaris yang berasal dari Pekabaran Injil Baptis Inggris untuk berencana mengembangkan agama Kristen di sana, namun Raffles justru mengarahkan ke suatu wilayah di utara yang masih dianggap menganut paganisme (Reid, [2010](#)). Suku yang bernaung

di dalamnya adalah Batak dan 3 misionaris (Ward, Evans, Richard Burton) itu pun menyetujui saran tersebut. Dalam catatan perjalanan mereka sampai hingga ke Rura Silindung (Kota Tarutung sekarang) dan diterima oleh raja setempat dengan baik. Akan tetapi proses Kristenisasi tidak berjalan dengan baik sebab ketiga misionaris tidak memahami adat setempat dan banyak memiliki salah sangka sehingga menemui kegagalan dalam menjalankan misinya.

Pada 1834 datang kembali misionaris yang datang dari Amerika. Mereka adalah Samuel Munson dan Henry Lyman yang diutus oleh gereja Kongregationalis, Amerika. Perjalanan mereka dimulai dari Sibolga dengan tujuan Silindung seperti yang pernah dituju oleh tiga misionaris asal Inggris sebelumnya. Akan tetapi, ketika masih sampai di Lobu Pining keduanya justru ditangkap oleh Raja Panggalamei dan dibunuh. Konon jasad keduanya juga disantap karena dianggap sebagai *hambing bottar* (kambing putih). Kegagalan kedua yang tragis tersebut tidak menyurutkan langkah kristenisasi yang pada tahun yang sama tetap diteruskan oleh seorang misionaris dari Jerman, Ludwig Ingwer Nommensen. Misionaris terakhir inilah yang dianggap peletak dasar nilai-nilai kekristenan bagi orang-orang Batak di pedalaman.



Gambar 1. Tugu peringatan Munson & Lyman dalam misi *zending* yang didirikan pada 1907

Di situ tertulis: *Zur Erinnerung an die Amerikanischen Märtyrer des Evangeliums im Batakland Henry Lyman dan Samuel Munson 1834* yang artinya “Munson dan Lyman dari Amerika meninggal dunia dilahap oleh orang Batak”.

Sumber: Tugu peringatan di Kecamatan Adiankonting, Tapanuli Utara.

Masa-masa awal penginjilan Nommensen memiliki tantangan yang cukup berat, akan tetapi di saat yang terdapat juga beberapa kemudahan dalam penyebaran agama Kristen ke orang-orang Batak di Silindung. Tantangan utamanya berasal dari internal sendiri, ketika Raja Sisingamangaraja XII masih menganut agama *Sipelebegu* sebagai kepercayaan nenek moyang dan masih diikuti oleh mayoritas orang Batak. Beruntungnya Nommensen adalah telah belajar dan memahami terlebih dahulu bahasa Batak yang tidak pernah diperhatikan oleh misionaris sebelumnya, sehingga berbagai hal bisa tersampaikan dengan baik. Hal ini pula yang memudahkan penguasa Silindung, Raja Pontas Lumban Tobing untuk masuk Kristen. Untuk setelahnya semuanya akan semakin mudah oleh Nommensen.



Gambar 2. Konferensi para misionaris di Tanah Batak pada 1899

Sumber: (Hemmers, [1928](#)).

Pada 1842 Keresidenan Tapanuli dibentuk oleh Belanda. Pembentukan ini juga semakin memperkuat proses Kristenisasi di tanah Batak. Hindia-Belanda sepenuhnya 'mendukung' apa yang dilakukan oleh Nommensen. Mendukung di sini bukan dengan persoalan sumber daya, melainkan legalitas dan ketiadaan turut campur, sebab bagaimanapun juga ideologi kekristenan antara Jerman dan Belanda memiliki perbedaan yang signifikan. Sejak itu wilayah yang disebut sebagai tanah Batak (Silindung, Toba, Balige, Humbang) yang masuk dalam lingkup Keresidenan Tapanuli menjadi Kristen. Perwujudan yang paling kentara adalah Kristen Protestan, sesuai dengan yang terjadi di Jerman di mana Kristen Protestan sejak Martin Luther telah berkembang. Oleh sebab itu banyak perkumpulan gereja yang berasal dari Tapanuli berbentuk Kristen Protestan seperti yang dapat dilihat ke dalam bentuk Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Huria Kristen Batak (HKB), dan lain sebagainya.

Mudahnya Kristen menjadi bagian dari Batak sendiri karena terdapat beberapa konsep adat istiadat yang bisa diadopsi ke dalam bagian Kristen. Misalnya adalah konsep *dalihan na tolu* yang mirip dengan konsep Trinitas Kristen serta nama *Debata* sebagai pencipta alam menjadi bagian dari Alkitab dalam memandang Allah atau Tuhan seperti yang telah diterjemahkan oleh Nommensen dan P.H. Johannsen pada 1874 (Pohan, [2020](#)). Langkah-langkah ini dapat memperkuat kekristenan di tanah Batak.

Proses Kristenisasi tersebut tidak serta merta menganggap diri orang Batak sebagai Kristen. Berbeda dengan orang Melayu yang jelas mendaku diri jika orang Melayu pasti Islam, orang Batak tidak seperti itu. Tidak ada indikator yang harus dipenuhi seorang Batak pasti Kristen seperti indikator yang harus dipenuhi pada orang Melayu. Ada kalanya seseorang yang tegas menyebut diri sebagai orang Batak, namun di saat yang sama juga memiliki kepercayaan sebagai Islam. Akan tetapi hal ini terjadi pada waktu lebih belakangan, ketika Indonesia sudah mulai mengisi kemerdekaannya sejak pertengahan abad ke-20. Meskipun pada periode tersebut tetap saja penyebutan Batak dikaitkan dengan kepercayaan Kristen di baliknya, namun persoalan ini berasal dari sisa-sisa sejarah tentang identitas keagamaan di balik identitas kesukumannya.

Pergolakan Identitas

Patut dicatat adalah labelisasi agama dalam etnisitas Melayu dan Batak memiliki perbedaan berarti. Pada Melayu, konsep identitas keislamannya muncul dari diri mereka yang mendaku bahwa Melayu adalah Islam. Sementara labelisasi Kristen pada Batak muncul bukan karena penyebutan dari kelompok mereka sendiri, persis seperti pemaknaan istilah Batak itu sendiri sebelum kedatangan Kristen. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa Melayu adalah Islam karena proses internal, sementara Batak adalah Kristen karena proses eksternal. Bagi orang Batak sendiri tidak masalah apakah seseorang Batak itu Kristen ataupun Islam karena mereka dianggap sebagai keluarga Batak. Meskipun begitu pergolakan identitas nyatanya terlihat, khususnya ketika kolonial menguasai Sumatera Timur.

Sebelum kedatangan kolonial, persoalan Batak dan Melayu bukanlah menjadi persoalan identitas. Bahkan istilah 'Batak' sendiri tidak pernah muncul sebagai sesuatu yang membedakan antara orang pegunungan dengan pesisir. Hal ini bisa dilihat dari berbagai tradisi lisan orang-orang Melayu sendiri yang tidak pernah menyebut kata Batak sebagai bagian kegiatan sosialnya, kecuali dalam satu penyebutan di *Hikayat Deli* yang kemungkinan ditulis pada awal abad ke-19. Dalam hikayat tersebut bisa dilihat bahwa penjajakan orang Eropa sudah menunjukkan tanda-tanda penguasaan wilayah tersebut. Selebihnya tidak ada kata "Batak" menyertai dalam berbagai kisah atau cerita apapun, termasuk kisah *Putri Hijau* yang terkenal dengan berbagai marga atas tokoh-tokohnya namun tidak menyebut kata "Batak" sama sekali. Artinya, bukan persoalan identitas yang menjadi garis pemisah antara pesisir dan pedalaman, melainkan konstruksi Melayu itu sendiri sebagai masyarakat yang dianggap paling berbudaya.

Pertanyaan yang paling mendasar kapan pergolakan ini dimulai? Atau apakah ada pergolakan semacam itu di Sumatera Timur? Dua pertanyaan mudah dengan jawaban mudah, namun cukup sulit mencari pembuktiannya. Tidak ada tanggal atau tahun pasti mengenai itu. Akan tetapi realitas sosial sejarah kiranya bisa menjadi penjelasan yang dapat memberikan opini berarti.

Jika kita datang ke desa-desa pedalaman di sekitar Sumatera Timur pada masa kini, khususnya orang-orang yang mayoritas Melayu, maka kita akan temukan bahwa penyebutan Batak selalu *include* kepercayaan agama Kristen di dalamnya. Lebih jauh ke belakang label tersebut akan semakin kuat. Semakin kuat lagi jika berbicara pada era kesultanan yang di saat bersamaan kolonial hadir sebagai representasi pemerintah. Namun, seperti apa yang disebut oleh Perret hal ini tidak akan ditemukan pada masa pra-kolonial (Perret, [2010](#)). Artinya pergolakan identitas tersebut bisa dilihat pada realitas historis masa-masa kolonial.

Kedatangan kolonial ke Sumatera Timur yang menguasai tanah perkebunan orang-orang Melayu sudah menjadi narasi umum. Namun, kedatangan kolonial ke tanah Batak hingga membentuk suatu keresidenan yang disebut dengan

Keresidenan Tapanuli belum banyak diketahui alasannya. Jika untuk menguasai ekonominya, baik pertanian atau pertambangan, hal itu tidak memungkinkan sebab tanah-tanah di Tapanuli tidak sebaik tanah yang ada di Sumatera Timur. Bahkan terkadang orang Batak yang datang dari pegunungan datang ke pesisir untuk meminta tanah dengan catatan orang tersebut harus menjadi Melayu. Maka bisa dipastikan bahwa pembentukan Keresidenan Tapanuli itu sendiri memiliki alasan lain. Alasan paling kuat dalam mendukung argumen tersebut adalah alasan militer, bukan alasan ekonomi yang selama ini disangkakan. Posisi Tapanuli sebagai pembatas politik antara kekuatan Islam di Minangkabau dengan Aceh cukup beralasan, sebab jika keduanya bergabung menghadapi Belanda, maka akan menjadi pekerjaan sulit menanggulangnya.

Keresidenan Tapanuli sendiri dibentuk pada 1842, lebih dahulu dibandingkan Keresidenan Sumatera Timur yang dibentuk pada 1887. Sekitar 20 tahun sebelumnya gerakan Padri telah mencapai wilayah Tapanuli yang akhirnya terhenti karena sebab-sebab yang telah disebutkan. Hal ini memunculkan kekhawatiran kolonial jika sampai bergabung dengan Aceh, maka tidak ada kesempatan lagi untuk menguasai seluruh Sumatera di bawah genggaman Hindia-Belanda. Untuk memuluskan penguasaan Tapanuli maka utusan *zending* lebih diharapkan dalam memutuskan mata rantai keislaman antara Minangkabau dengan Aceh. Terlebih Islam dan Kristen memiliki riwayat panjang dalam pertentangannya di Barat. Dengan penguasaan secara religi dan militer, maka pembentukan Keresidenan Tapanuli akan menjadi pembatas yang sempurna. Langkah-langkah yang diperlukan adalah dengan melakukan misi *zending* terlebih dahulu, lalu penguasaan politik oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Misi kolonial sendiri tidak mementingkan kristenisasi itu sendiri, oleh sebab itu proses tersebut diberikan oleh *zending* yang berasal dari negara lain. Oleh sebab itu berturut-turut *zending* yang mencoba melakukannya berasal dari Amerika, Inggris, dan Jerman. Misi *zending* yang terakhir akhirnya yang sukses menjalankannya. Proses kristenisasi itu sendiri ternyata tidak mudah. Meskipun pada waktu sebelumnya terjadi gerakan Paderi di Tapanuli, masyarakat yang masih selamat tidak menerima begitu saja ajaran Kristen yang ditawarkan oleh para misionaris. Terbukti dua misi sebelumnya terjadi kegagalan, bahkan misi pertama berakhir tragis. Misi ketiga yang dipimpin oleh Nommensen akhirnya menemui keberhasilan setelah mempelajari kesalahan-kesalahan misi sebelumnya. Setelah itu, ketika Kristen sudah diterima menjadi bagian kepercayaan orang Batak maka kolonial dengan mudah menguasai secara politik.

Penguasaan di Sumatera Timur sendiri tidak dilakukan dengan cara-cara seperti di Tapanuli, sebab orang-orang Melayu tidak bisa berganti kepercayaan semudah itu dari Islam menjadi Kristen. Maka politik penguasaannya berbeda. Pemerintah kolonial menghendaki status pemimpin-pemimpin di Sumatera Timur yang awalnya hanya setingkat kepala suku menjadi bentuk sultan, seakan menguasai kerajaan yang besar (Anwar, 2016). Sistem adat dan keagamaan tetap dipertahankan, malahan difasilitasi dengan berbagai pembangunan tempat suci maupun istana. Hal ini bertujuan untuk keleluasaan konsesi tanah perkebunan yang memang menjadi fokus utama penguasaan tersebut.

Keberhasilan kristenisasi di Tapanuli mengubah *image* orang pedalaman tidak sebagai orang-orang pagan dan biadab, melainkan sebagai orang Kristen saja yang pada dasarnya merujuk pada pembedaan dengan orang-orang Melayu. Persoalannya adalah bahwa istilah 'Batak' menjadi kuat sejak *zending* berhasil memainkan peranannya. Ketika Keresidenan Tapanuli telah menjadi wilayah administratif Hindia-Belanda, maka terdapat perubahan dalam peta etnis yang dibuat oleh Junghuhn pada 1841 dalam *Die Battalander auf Sumatra* dengan Collet (Jansen, 1925). Peta tersebut menyebut sebagai "Tanah Batak" dengan batas-batas yang jelas sehingga menguatkan bahwa wilayah Keresidenan Tapanuli adalah orang-orang Batak. Bersama dengan perkembangan agama Kristen di dalamnya, maka penyebutan Batak adalah Kristen juga semakin kuat, khususnya kepada orang-orang Melayu yang terbiasa pada labelisasi identitas kesukuan berdasarkan kepercayaannya.

Dampak atas labelisasi tersebut adalah semakin sulitnya proses migrasi orang-orang pedalaman menuju Sumatera Timur yang ketika perkebunan kolonial semakin berkembang juga meningkatkan ekonomi. Penguasa lokal Sumatera Timur yang telah diangkat menjadi sultan menetapkan aturan bahwa orang 'Batak' tidak bisa mendapatkan tanah di sana, kecuali mau memeluk Islam. Hampir sama dengan masa pra-kolonial, akan tetapi kali ini lebih tegas lagi. Agama menjadi persoalan utama, sebab antara Kristen dan Islam menjadi perbedaan yang dapat menimbulkan gesekan yang tidak dikehendaki. Labelisasi Melayu menjadi aturan yang ketat, khususnya sejak kolonial menjadi bagian dalam usaha industri perkebunan. Tanah *jaluran* yang berasal dari industri perkebunan dianggap sebagai tonggak "Melayunisasi" kepada para perantau yang berasal dari pedalaman.

Politik Identitas

Pemerintahan di Sumatera Timur sebelum masuknya kolonial lebih ke arah komunal. Status pemimpin disetarakan sebagai pemimpin adat, dengan kemungkinan tertinggi paling-paling hanya setingkat bupati seperti di Jawa

(Purwanto, 2009). Sepanjang sistem tersebut adat memegang peranan utama dalam pemerintahannya. Agama Islam menjadi bagian dari sistem tersebut dalam situasi politik antara masyarakat yang dianggap masuk ke wilayah pesisir dengan masyarakat pedalaman yang hidup di pegunungan. Masuknya kolonialisme mengukuhkan pemerintahan yang bercorak Islam semakin kuat.

Perubahan sistem pemerintahan setelah datangnya kolonialisme mula-mula ditandai dengan corak kepemimpinan. Para pemimpin pribumi yang awalnya paling tinggi disebut setingkat bupati mulai dinaikkan derajatnya setara raja. Realitas yang muncul adalah bermunculan sultan-sultan di Sumatera Timur yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah seperti Kesultanan Serdang, Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan, Kesultanan Langkat yang kesemuanya berada dalam naungan Keresidenan Sumatera Timur yang dikuasai kolonial. Tujuan dari pengangkatan kesultanan tersebut terkait dengan penguasaan tanah secara luas untuk industri perkebunan. Dampaknya bagi kehidupan pribumi adalah penguasaan tanah tidak lagi dilakukan secara komunal dan identitas keislaman semakin menguat dalam mengatur sistem bermasyarakat di Sumatera Timur.

Perubahan pemimpin yang dianggap sebagai pemangku adat menjadi sultan banyak mengubah sendi-sendi kehidupan beragama. Dalam praktiknya sultan dianggap sebagai pemimpin syariat Islam sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan agama berada pada aturan kerajaan. Misalnya adalah penentuan mufti, penghulu dan berbagai pemimpin masyarakat di tingkat dasar harus beragama Islam. Termasuk di dalamnya masyarakat yang tinggal dan ingin memiliki tanah di wilayah kesultanan memiliki syarat sebagai pemeluk Islam.

Perkebunan kolonial yang telah terbuka luas memiliki buruh yang banyak berasal dari Jawa. Meskipun sejak permulaan pembukaan perkebunan tersebut terdapat orang-orang China maupun Tamil, persoalan identitas keagamaan masih bukan menjadi persoalan. Sebab pada awal-awal pembukaan perkebunan tersebut otoritatif pemerintahan lokal masih belum kuat. Akan tetapi sejak perluasan perkebunan yang kian gencar dan membuka hutan sebanyak-banyaknya maka kebutuhan tenaga kerja juga semakin meningkat. Di satu sisi mendatangkan buruh dari Jawa lebih ekonomis, selain dekat dan murah rupa-rupanya hal ini tidak menimbulkan persoalan identitas karena sebagian besar buruh tersebut menganut agama Islam. Kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur semakin tidak mempersoalkan identitas tersebut. Akan tetapi ketika masyarakat pedalaman Sumatera Timur yang diidentifikasi sebagai "Batak" mulai memasuki daerah Sumatera Timur maka persoalan berubah. Terjadi anggapan curiga dan bahkan penentangan terhadap orang "Batak" tersebut. Selain dianggap kasar, orang "Batak" memiliki identitas keagamaan yang tidak cocok bagi mereka, yakni Kristen.

Agama Islam dan Kristen menjadi agama persinggungan yang telah hadir sejak abad ke-10, ketika perang dan perebutan kota suci mulai dari Yerusalem hingga Byzantium menghasilkan sistem pertentangan yang tak pernah habis. Begitu juga ketika dua agama tersebut menjadi bagian dari masyarakat di Sumatera Timur, terutama kedua agama tersebut berkembang di masyarakat yang sejak awal memiliki perbedaan identitas budaya antara Melayu dan "Batak". Maka pertentangan yang pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya terhadap sejarah budaya mereka menguat terkait Islam dan Kristen di masa silam.

Dampak dari kondisi semacam itu adalah penolakan pemimpin lokal Melayu terhadap suku-suku pedalaman yang dianggap sebagai Kristen. Bagi para pemimpin lokal identitas Kristen adalah garis pemisah yang nyata terhadap orang-orang Melayu. Oleh sebab itu penolakan terhadap komunitas yang sudah dianggap "Batak" dan memiliki kepercayaan Kristen sudah cukup untuk menolak kehadiran mereka secara mentah-mentah. Namun, meskipun begitu komunitas Kristen pada orang "Batak" tidak serta tertolak begitu saja, sebab sejak awal abad ke-20 komunitas tersebut mulai datang dan menghuni wilayah Sumatera Timur dari daerah Simalungun dan Karo, tentunya dengan bantuan pemerintahan kolonial.

Alasan yang spesifik dalam menumbuhkan identitas Batak di wilayah Sumatera Timur hanyalah untuk mengesahkan keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang ada di Sumatera Utara juga, meskipun berbeda dalam wilayah Keresidenan. Menurut Westenburg dan Van der Plas, identitas Batak mesti ditunjukkan demi alasan-alasan politik. Hal ini mengingat beban yang ditanggung oleh masyarakat pedalaman yang dianggap sebagai "Batak" bahwa orang Melayu adalah sekutu Pemerintah. Bagaimanapun juga orang "Batak" diperlukan kolonial dalam menjaga stabilitas politik di kawasan Sumatera Timur Laut karena Islam terus menguat di wilayah Minangkabau, Aceh, Riau, dan tentu saja di Sumatera Timur. Menurut Langenberg kedatangan orang Batak, khusus yang berasal dari Toba, dapat menjadi pengurai atas maksud gerakan-gerakan perlawanan terhadap Kolonial Belanda oleh orang-orang Islam (Langenberg, 1972). Tentunya disebabkan gerakan misionaris di tanah Batak telah dianggap berhasil.

Pemerintah Kolonial memanfaatkan para misionaris dan para ilmuwan dalam memperkenalkan identitas Batak ke wilayah masyarakat Melayu di Sumatera Timur. Selain itu, untuk melegalisasi rencana tersebut maka pemerintah

akhirnya menetapkan sebuah jabatan di pemerintahan kolonial untuk penasihat urusan Toba atau *adviseur voor Tobaneesche zaken*. Tugas utamanya terutama membantu para misionaris Jerman mendatangkan orang-orang Batak yang berasal dari Toba yang telah beragama Kristen untuk mengembangkan pertanian di wilayah Simalungun yang menjadi tepi batas antara Sumatera Timur dengan Keresidenan Tapanuli. Misi ini cukup berhasil, sehingga pada 1914, jumlah orang Batak di wilayah Sumatera Timur sudah berkisar 1.000 orang (Ezerman, [1926](#)).

Upaya lain dalam merumuskan identitas “Batak” adalah dengan mendirikan *Bataksch Instituut* di Leiden pada 1908. Tujuannya adalah menguatkan identitas tersebut benar-benar hadir dan ada di dalam alam kehidupan masyarakat di Tapanuli dan juga Melayu di Sumatera Timur. *Bataksch Instituut* bukanlah lembaga misionaris, akan tetapi yang patut diingat adalah lembaga tersebut dikelola oleh sebagian besar orang-orang misionaris, termasuk M. Joustra yang menjadi direktur lembaga tersebut. Cabangnya adalah *Bataksh Vereeniging* yang bertempat di Medan dan memiliki anggota orang Eropa yang memiliki perhatian terhadap orang-orang Batak di pedalaman. Tujuannya disebut untuk membela kepentingan orang-orang Batak itu sendiri, di bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial.

Para misionaris yang terdapat di lembaga tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan identitas Batak dan tentu saja termasuk identitas Kristen. Penggunaan bahasa Batak di ruang-ruang formal sangat diutamakan, seperti di sekolah dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menghalau orang-orang Batak dalam mengenal bahasa Melayu yang pada saat itu telah menjadi bahasa pengantar di ruang-ruang publik pribumi. Anggapan Pemerintah Kolonial adalah bahwa bahasa Melayu beserta aksara Latin dapat melarutkan identitas ke-Batak-an dan juga identitas Kristen ke dalam ide-ide agama Islam yang telah berkembang luas di Sumatera Timur. Maka buku-buku dan bahasa pengantar dilakukan dengan bahasa Batak. Alkitab dan bahasa pengantar di gereja-gereja khususnya dilakukan dengan bahasa Batak termasuk unsur adat yang dianggap tidak bertentangan dengan agama Kristen. Tujuan ini adalah untuk mempromosikan unsur Batak, namun pada dasarnya tindakan tersebut sebagai usaha mempertahankan diri dari islamisasi dan Melayunisasi.

Usaha yang dilakukan lembaga atas nama Pemerintah Kolonial tersebut pada dasarnya tidak terlalu berhasil. Seorang Batak yang menggunakan berbagai perangkat budaya Batak seperti aksara, bahasa, dan sebagai tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Sumatera Timur. Industri perkebunan yang berkembang di Sumatera Timur hanya menggunakan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantarnya. Termasuk aksara Latin dalam proses administrasi. Sehingga orang Batak mau tidak mau harus menggunakan aksara Latin atau Melayu jika ingin menjadi bagian dari komunitas masyarakat Sumatera Timur. Hal ini juga terkait pada persoalan agama Islam yang telah menjadi sistem kepercayaan utama.

Jalan satu-satunya adalah melebur pada kebiasaan Melayu agar seorang Batak dapat berkembang di Sumatera Timur. Meskipun untuk kepercayaan agama Kristen jarang untuk beralih seperti Melayu yang mensyaratkan agama Islam, orang Batak umumnya masih mempertahankannya. Hal ini berdampak pada pembentukan komunitas tersendiri di wilayah Sumatera Timur. Dalam kehidupan antar kelompok mereka, penggunaan unsur Batak masih dilakukan. Termasuk dalam penggunaan nama gereja dan bahasa pengantarnya sehingga masyarakat luar yang melihatnya sulit untuk membedakan antara Batak dan Kristen. Dalam perkembangannya penyebutan Batak termasuk juga di dalamnya Kristen tidak dibedakan lagi sehingga menjadi labelisasi tidak langsung.

Realitas Batak dan Islam sebagai Identitas

Secara umum telah dijelaskan bahwa proses penyebutan Melayu sebagai Islam berasal dari internal mereka sendiri dengan berbagai falsafah kehidupan Melayu yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaannya dengan masyarakat Batak yang dilabelkan sebagai Kristen hadir pada pihak di luar mereka karena realitas sosial mereka yang menunjukkan penguatan budaya Batak ke dalam sistem keagamaan Kristen. Pada akhirnya identitas tersebut menguat hingga Indonesia merdeka. Peran Kolonial tidak bisa diabaikan dalam penguatan identitas tersebut, khususnya yang terjadi pada masyarakat Batak. Sementara peran masyarakat lokal juga punya andil dalam pembentukan identitas tersebut, meskipun dilakukan secara tidak langsung.

Identitas Islam sendiri tidak terlepas pada awal abad ke-19, ketika gerakan Paderi melanda daerah Tapanuli. Secara singkat bahwa gerakan Paderi tersebut sukses melanda wilayah selatan Tapanuli, khususnya daerah Mandailing. Unsur budaya yang dianggap pagan telah tergantikan dengan konsep Islam yang terus dipegang secara teguh. Akan tetapi gerakan ini ketika akan mencapai wilayah utara Tapanuli terhenti disebabkan faktor alam, yakni menyebarnya wabah kolera sehingga menghentikan gerakan Paderi. Selang beberapa tahun kemudian ketika gerakan Paderi tidak menunjukkan tanda-tanda kembali, misionaris hadir dalam mengubah wajah Tapanuli Utara menjadi wilayah *zending*

dan terus menguat hingga sekarang ini. Seperti penyebutan Kota Tarutung, ibu kota Tapanuli Utara sekarang, sebagai kota rohani.

Wilayah Mandailing yang berada di Tapanuli Selatan pada masa kolonial masuk ke dalam Keresidenan Tapanuli yang juga mencakup Tapanuli Utara. Meskipun begitu Mandailing tetap menolak menjadi bagian dari unsur budaya Batak, meskipun pada realitas budaya ditemukan kesamaan-kesamaan pada masyarakat Batak. Hal ini bukan berarti “Batak” adalah realitas tunggal dalam penyebutan adat istiadat dan kebiasaan yang sama yang ditemukan pada masyarakat Mandailing. Pertentangan-pertentangan ini muncul sejak masa kolonial dalam suatu insiden yang cukup terkenal dalam perebutan identitas keislaman di tengah-tengah budaya Batak yang terus mengemuka. Insiden tersebut secara historis disebut peristiwa Sei Mati di Kota Medan sebagai ibu kota keresidenan Sumatera Timur.

Sejak awal abad ke-20 perkebunan yang sukses mengubah Sumatera Timur dan Kota Medan menjadi kota modern telah mempengaruhi proses migrasi orang-orang Tapanuli, baik yang berasal dari utara maupun dari selatan. Orang-orang dari wilayah selatan lebih banyak masuk ke Sumatera Timur dan Kota Medan karena relatif diterima oleh penguasa setempat disebabkan agamanya Islam. Orang-orang dari Tapanuli Selatan ini terbagi pada dua kelompok besar, yakni Mandailing (Penyabungan, Kotanopan, Hutapungkut, Natal) dan Angkola (Padangbolak, Padanglawas, dan Sipirok). Kedua kelompok tersebut beragama Islam yang tentu saja mendapat tempat untuk berbagai profesi dan pekerjaan yang tersedia di Kota Medan dan semua Sumatera Timur. Berbeda halnya dengan orang-orang Tapanuli Utara yang beragama Kristen relatif sulit untuk berkembang karena dibatasi relasi sosialnya.

Pada awalnya orang Angkola dan Mandailing menjalani kehidupan secara normal, bahkan kedua kelompok itu bersatu dengan mendirikan surat kabar pribumi *Pewartu Deli* yang memiliki oplah terbesar di Sumatera Timur. Akan tetapi pergesekan mulai muncul ketika pada 1906 Angkola mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Batak. Menurut Hidayat dan Damanik, pergesekan tersebut karena kelompok Mandailing tidak suka jika Angkola bagian dari Batak. Menurut mereka istilah “Batak” lebih ke arah nada menghina sehingga kelompok Mandailing memberikan dua pilihan, menjadi Mandailing atau berpisah secara kultural yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi yang telah terjalin selama ini (Hidayat & Damanik, 2018). Angkola tetap dengan pendiriannya dan pertentangan tersebut berlanjut antara 1906-1939. Puncaknya adalah peristiwa Sei Mati ketika seorang Angkola meninggal dunia namun ditolak dalam pekuburan muslim yang ada di Sei Mati. Penolakan tersebut didasarkan atas sikap Angkola yang tetap kukuh menjadi bagian dari Batak, namun di sisi lain juga beraga Islam. Hal ini yang tidak diterima oleh masyarakat Mandailing.

Jika dilihat secara kritis bahwa pada dasarnya buka masalah kultural di dalam diri “Batak” yang menjadi persoalan, namun lebih pada identitas agama di belakangnya. Meskipun Angkola memandang diri sebagai Islam sekaligus Batak, hal ini tidak bisa diterima karena “Batak” telah identik dengan Kristen yang “sangat berbeda” dengan Mandailing yang Islam. Hal ini bisa dilihat dari kasus Willem Iskandar misalnya, seorang Mandailing tulen, tetapi memilih agama Kristen sebagai kepercayaannya. Hingga sekarang Willem Iskandar di kampung halamannya tidak dianggap sebagai seorang tokoh. Hanya dianggap sebagai contoh seorang murtad yang tidak layak untuk ditiru.

Keterpisahan agama di Tapanuli merembet pada keterpisahan kultural yang terus berlarut-larut hingga sekarang. Misalnya adalah rencana pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai provinsi baru menemui kendala karena keterpisahan-keterpisahan tersebut meskipun di masa kolonial menjadi satu keresidenan. Identitas Melayu sebagai Islam nampaknya bukan masalah berarti karena tidak ada yang menyangkal akan hal itu. Akan tetapi berbeda jika identitas Batas dikaitkan sebagai keislaman, maka orang-orang akan mengernyitkan dahi karena istilah Batak akan selalu merujuk pada identitas Kristen yang melekat.

SIMPULAN

Labelisasi Melayu sebagai Islam dan Batak sebagai Kristen muncul secara berbeda. Untuk pelabelan Melayu sebagai Islam hadir berasal dari pihak internal mereka, atau dengan kata lain penyebutan secara eksklusif yang berasal dari kelompok Melayu sendiri. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup Melayu bahwa syarat menjadi Melayu adalah menjalankan adat Melayu, berbahasa Melayu, dan terutama beragama Islam. Jika tidak beragama Islam maka seseorang tidak bisa disebut Melayu karena ini menjadi syarat paling utama.

Sementara itu proses identitas Batak menjadi Kristen adalah proses yang berlaku secara eksternal atau inklusif karena pelabelan dilakukan oleh orang yang berasal dari luar kelompok tersebut. Hal ini berdasarkan berbagai sumber dalam menampilkan budaya Batak sebagai salah satu suku di Sumatera Utara telah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial dengan mendirikan berbagai lembaga seperti *Bataksch Instituut* pada 1908 di Leiden dan lembaga *Bataksh Vereeniging* yang bertempat di Medan, Sumatera Timur. Proses tersebut banyak melibatkan para *zending* dan pastur yang telah

berkembang sebelumnya di wilayah Tapanuli sehingga corak Kristen mengiringi upaya menampilkan identitas Batak. Upaya pemerintah Hindia-Belanda adalah untuk mengendalikan perkembangan Islam di Sumatera Timur agar lebih kondusif. Citra yang muncul pun adalah seolah Batak dan Kristen tidak berbeda, termasuk dalam pendirian gereja-gereja yang identik dengan nama salah satu dari sub-suku Batak. Masyarakat yang berada di luar kelompok agama tersebut memandang Batak sama artinya dengan Kristen, meskipun yang memandang sendiri adalah seorang Batak yang Islam.

REFERENSI

- Amliansyah, & Fatimah, S. (2021). Islamization of Mandailing Natal After the Padri War. *Science and Environmental Journals for Postgraduate (SENJOP)*, 4(1), 71–75.
- Anwar, S. (2016). *Transportasi Perkotaan di Medan pada Paruh Pertama Abad ke-20 M*. Unvesitas Gajah Mada.
- Aritonang, J. S. (2014). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cortesao, A. (2015). *Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Yogyakarta: Ombak.
- Ezerman. (1926). *Mvo Simalungun en Karolanden*.
- Hadi, A. (2000). *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-karya Hamzah Fansur*. Jakarta: Paramadina.
- Hemmers, J. H. (1928). *Konferensi para misionaris di Tanah Batak pada 1899*.
- Hidayat, & Damanik, E. L. (2018b). Batak dan Bukan Batak: Paradigma Sosiohistoris Tentang Konstruksi Identitas Etnik di Kota Medan, 1906-1939. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 71–87. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19624>
- Huda, K. (2016). Islam Melayu Dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 78–96.
- Husny, T. L. (1978). *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Jansen, G. (1925). Grantrechten in Deli. *Oostkust van Sumatra-Instituut, Mededeeling No. 12*.
- Kuntowijoyo. (2021). *Metodologi Sejarah* (cetakan V; M. Yahya, Ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, S. (2018, October 18). Barus, Titik Nol Islam Nusantara.
- Langenberg, M. van. (1972). Charles Millners accounts of Sumatra, 1770-1772. *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, 6(1), 116.
- Mailin. (2016). Perkembangan Islam Di Sumatera Timur (Strategi Komunikasi Politik Sultan di Asahan). *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 91–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/ab.jki.v1i1.508>
- Mailin. (2017). Akulturasi Nilai Budaya Melayu dan Batak Toba pada Masyarakat Melayu Kota Tanjung Balai Asahan. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 155–173. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v41i1.328>
- Pelly, U. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pohan, Z. R. H. (2020, November). Kristenisasi dan Modernisasi Meminggirkan 'Agama Batak.'
- Purwanto, B. (2009). Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia. Retrieved October 17, 2022, from sejarah.fib.ugm.ac.id website: <http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/11/menelusuri-akar-ketimpangan-dan.html>
- Reid, A. (Ed.). (2010). *Sumatera Tempo Doeloe, dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Simarmata, J. (2016, June 2). Arti dan Asal Mula Kata Batak.
- Tanjung, I. L., Purwanto, B., & Setyawati, N. A. (2016). Colonial Politics in Forming Ethnic Identity of Melayu Minangkabau and Batak in Tapanuli. *Humaniora*, 28(1), 106–114.
- Utara, B. P. S. (2019). *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka*. Medan: CV. Rilis Grafika.
- Winstedt, R. O. (1940). A History of Malay Literature. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 17(3).